

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif. Berikut adalah mapping sejumlah penelitian terdahulu:

**Tabel 2.1. Mapping Penelitian Terdahulu
Penyelenggaraan Sekolah Inklusif**

NO	JUDUL/ PENELITI	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
1.	Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar Negeri Klego 1 Kabupaten Boyolali. Penelitian Istiningsih (2005)	Bagaimana penyelenggaraan Sekolah Inklusif di SD Negeri Klego 1 Kabupaten Boyolali. Dan faktor apa saja yang mendukung dan Menghambat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Negeri Klego 1 Boyolali cukup bagus. Hal itu tercermin dalam manajemen rekrutmen/identifikasi anak yang dilakukan oleh para guru dan para pembimbing khusus bagi anak yang membutuhkan pelayanan khusus telah memperoleh hasil yang cukup bagus, manajemen kurikulum yang memadukan kurikulum reguler yang disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi anak yang memerlukan pelayanan khusus, manajemen sumber dana yang mencakup APBN,

NO	JUDUL/ PENELITI	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
			<p>subsidy propinsi, subsidi kabupaten dan subsidi khusus pendidikan inklusif, manajemen pengadaan dan pembinaan tenaga kependidikan yang terdiri dari guru kelas biasa/reguler dan guru pembimbing khusus bagi anak yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus yang tetap mengutamakan pembinaan profesi dan pembinaan karir, manajemen pengelolaan sarana prasarana yang mencakup sarana umum dan sarana khusus bagi anak yang memerlukan pelayanan khusus, manajemen kegiatan belajar mengajar /perangkat KBM yang mencakup pembelajaran umum seperti halnya sekolah reguler yang dipadukan pembelajaran khusus bagi anak yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus, serta manajemen pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara optimal sehingga diperoleh sinergi kerjasama</p>

NO	JUDUL/ PENELITI	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
			yang baik antara pihak sekolah dengan masyarakat.
2.	<p>Kajian Terhadap Implementasi Pendidikan Inklusif Sebagai Alternatif Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Anak Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Boyolali.</p> <p>R. Indianto, Munawir Yusuf (2009)</p>	<p>Bagaimana penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Sebagai Alternatif penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Anak Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Boyolali. Beserta faktor-faktor yang mempengaruhi</p>	<p>Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah ABK yang mendapatkan pelayanan pendidikan melalui sekolah inklusif di Kab. Boyolali adalah 13,3% (1173 siswa) dari total siswa sebanyak 10.059 anak. Dari jumlah tersebut, karakteristik kelainan ABK terdistribusi 81,42% kesulitan belajar dan lamban belajar, 7,9% gangguan emosi, perilaku dan sosial, 2,5% gangguan wicara, 1,36% gangguan penglihatan, 1,19 cacat tubuh, 1,19 autisme, 0,77 tunagrahita, dan 3,15 kategori lain-lain. Dari 74 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kab. Boyolali, 23,4% termasuk kategori baik, 72,9% kategori cukup atau sedang, dan 3,6% kategori kurang. Dalam hal implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif, diketahui bahwa 24,18% kategori baik, 47,72% kategori cukup, dan 28,11%</p>

NO	JUDUL/ PENELITI	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
			<p>kategori kurang. Sementara itu persepsi guru terhadap pendidikan inklusif, 19,30% (tinggi), 64,20% (sedang), dan 16,50% (kategori rendah). Persepsi ABK terhadap pendidikan inklusif diketahui bahwa 19,46% (positif tinggi), 53,80% (cukup positif), dan sisanya 26,75% (kurang positif). Berdasarkan hasil penelitian deskriptif tersebut, dikembangkan model evaluasi diri, POS Inklusif dan Panduan pelatihan pendidikan inklusif.</p>
3.	<p>Implementasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Sistem Persekolahan Nasional,</p> <p>Ishartiwi (2011)</p>	<p>Bagaimanakah penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Sistem Persekolahan Nasional, beserta faktor-faktor yang mempengaruhi?</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pendidikan inklusif saat ini masih belum selaras dengan sistem persekolahan nasional yang cenderung menerapkan sistem layanan standar (perlakuan sama untuk setiap individu dan ketuntasan belajar dengan tolok ukur Standar Nasional). Terkait dengan kondisi ABK yang memiliki berbagai keterbatasan dan kebutuhan</p>

NO	JUDUL/ PENELITI	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
			<p>belajar, maka dalam implementasi pendidikan inklusif di sekolah memerlukan modifikasi kurikulum, strategi pembelajaran, sistem penilaian hasil belajar dan manajemen persekolahan yang sesuai dengan kebutuhan layanan ABK</p>
4.	<p>Analisis kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Fuadi Kamal (2012)</p>	<p>Bagaimana penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta serta faktor-faktor yang mempengaruhi.</p>	<p>Dari hasil penelitian ditemukan bahwa, pertama, pendidikan inklusif yang diselenggarakan di Provinsi DKI Jakarta cenderung untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program sekolah. Walaupun peserta didik dengan kecerdasan dan/atau bakat istimewa juga dimasukkan dalam salah satu peserta didik pendidikan inklusif, keberadaan mereka tidak banyak menjadi isu dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kedua, penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak menggunakan model sebagaimana terdapat</p>

NO	JUDUL/ PENELITI	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
			<p>dalam literatur dan ketentuan umum pendidikan inklusif. Model hanya merupakan bagian dari strategi yang perlu diketahui dan dilaksanakan guru. Ketiga, belum semua kategori anak berkebutuhan khusus diterima menjadi peserta didik program pendidikan inklusif. Hal tersebut berkaitan dengan belum terpenuhinya sumber daya sekolah yang memadai. Keempat, penunjukkan sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta melebihi ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Kelima, Pemerintah Provinsi DKI selalu bekerja sama dengan pihak sekolah dengan memberikan pelatihan bagi guru-guru inklusif, bantuan finansial, bantuan sarana dan prasarana, dan beasiswa bagi sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, mapping penelitian terdahulu dapat dilihat pada lampiran.</p>

NO	JUDUL/ PENELITI	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
5.	<p>Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di SD Negeri 03 Alai Padang Utara Kota Padang (Studi Pelaksanaan Pendidikan Di Sekolah Uji coba Sistem Pendidikan Inklusif)</p> <p>Oleh Tarmansyah Universitas Negeri Padang 2012</p>	<p>Bagaimana deskripsi secara obyektif tentang pelaksanaan pendidikan inklusif, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, dan usaha-usaha apakah yang telah dilakukan sekolah dalam mengatasi kendala pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri 03 Alai Padang Utara.</p>	<p>Pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri 03 Alai Padang, masih belum terlaksana dengan baik, yaitu; masih dalam bentuk sistem pendidikan terpadu. Kendala yang dihadapi oleh warga sekolah maupun pihak birokrasi, yaitu; belum adanya acuan formal tentang pelaksanaan pendidikan inklusif. Usaha warga sekolah dan pihak birokrasi sudah ada yaitu; mengadakan guru pembimbing khusus di sekolah, mengikuti kegiatan sosialisasi pendidikan inklusif.</p> <p>1. Adaptasi Kurikulum: Untuk mengadaptasi kurikulum antara lain didasarkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kebutuhan siswa secara individual. b. Pengetahuan tentang teori belajar secara umum. c. Pengetahuan tentang perlunya interaksi dan komunikasi untuk pembelajaran. d. Pengetahuan tentang apa yang harus

NO	JUDUL/ PENELITI	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
			<p>dipertimbangkan ketika membuat penyesuaian.</p> <p>e. Pengetahuan bagaimana kondisi khusus dan kecacatan dapat mempengaruhi belajar</p> <p>f. Pengetahuan tentang pentingnya melakukan penyesuaian lingkungan pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian.</p> <p>g. Kondisi lingkungan dan budaya setempat</p> <p>2. Kompetensi Guru</p> <p>a. Memahami visi, misi dan tujuan pendidikan inklusif</p> <p>b. Memahami dan terampil menilai karakteristik anak</p> <p>c. Mampu dan terampil melaksanakan asesmen, diagnosis dan evaluasi bidang pendidikan dan pengajaran.</p> <p>d. Memahami, menguasai isi materi, dan terampil praktek mengajar.</p>

NO	JUDUL/ PENELITI	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
			<p>e. Memahami dan terampil menyusun perencanaan dan pengelolaan pembelajaran.</p> <p>f. Terampil dalam pengelolaan perilaku dan interaksi sosial siswa.</p> <p>g. Mampu mengadakan komunikasi dan kemitraan kolaborasi</p> <p>3. Peranan Orangtua</p> <p>a. Memberikan kesadaran kepada orang tua akan efek positif, tentang bantuan yang diberikan orang tua di rumah, sehingga tidak ada perbedaan antara rumah dan sekolah</p> <p>b. Bahwa apa yang dilakukan orangtua berperan penting dalam pembelajaran dan perkembangan anak di rumah dan di sekolah</p> <p>c. Mengundang orang tua untuk berdiskusi dan berpartisipasi tentang pekerjaan di</p>

NO	JUDUL/ PENELITI	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
			<p>sekolah, pekerjaan rumah, dan cara yang dapat dilakukan orang tua, sehingga relevan dengan kehidupan sehari-hari.</p> <p>d. Membantu orang tua untuk melihat cara anak berinteraksi dengan lingkungan akan mempengaruhi perkembangan sosial dan akademik.</p> <p>e. Mengembangkan wawasan guru dan sekolah tentang kehidupan anak sehari-hari, mengurangi masalah psikologis, sehingga kerjasama orang tua, guru agar pengalaman anak terintegrasi secara bermakna.</p>
6.	Kajian Tentang Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Dengan Analisis SWOT Di	Bagaimana Pelaksanaan Pendidikan Inklusif dengan Analisis SWOT di SMP Negeri 4 Sidoarjo	Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diambil kesimpulan bahwa kajian tentang pelaksanaan Pendidikan Inklusif dengan Analisis SWOT di SMP Negeri 4 Sidoarjo sebagai berikut:

NO	JUDUL/ PENELITI	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
	<p>SMP Negeri Inklusif</p> <p>Effendi Susanto, Pendidikan Luar Biasa, FIP, Unesa, 2012</p>		<p>1. Kekuatan (<i>Strength</i>)</p> <p>a. Masyarakat mendukung penuh pelaksanaan pendidikan inklusif baik masyarakat umum maupun masyarakat sekolah.</p> <p>b. ABK lebih terarah dengan mengikutkannya di dalam kelas bersama anak reguler serta sangat membantu dan mendukung dalam pemahaman materi pelajaran selama kegiatan belajar.</p> <p>c. Guru diberikan keleluasaan di dalam pembuatan kurikulum untuk dimodifikasi atau diselaraskan dan disesuaikan dengan kemampuan ABK.</p> <p>d. Evaluasi sama dengan siswa reguler namun untuk Standar Ketuntasan Minimal (SKM) fleksibel untuk siswa ABK lebih</p>

NO	JUDUL/ PENELITI	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
			<p>diturunkan serta menyesuaikan kemampuan ABK.</p> <p>2. Kelemahan (<i>Weakness</i>)</p> <p>a. SMP Negeri 4 Sidoarjo baru bisa melayani anak autis, tunagrahita ringan, dan lambat belajar dan belum melayani ABK yang lainnya.</p> <p>b. Media sangat kurang memenuhi syarat untuk ABK, karena media masih dibuat seadanya dan terkadang media yang dibuat dianggap kurang menarik oleh ABK.</p> <p>c. Kurikulum yang dibuat oleh guru terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan ABK.</p> <p>d. Belum terlaksanakannya Progam Pengajaran Individual (PPI).</p> <p>e. Belum terlibatnya secara penuh guru pendamping khusus yang berkompeten baik didalam</p>

NO	JUDUL/ PENELITI	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
			<p>pembuatan kurikulum, evaluasi, dan KBM dalam hal ini sebagai yang seharusnya sebagai GPK di setiap pelajaran.</p> <p>3. Peluang (<i>Opportunity</i>)</p> <p>a. SMP Negeri 4 Sidoarjo merupakan SMP inklusif percontohan bagi sekolah lain sehingga bisa menjadikan inklusif yang berstandart.</p> <p>b. SMP Negeri 4 Sidoarjo mendapat dukungan penuh dari masyarakat sehingga bisa menjadi sekolah inklusif yang mandiri</p> <p>c. SMP Negeri Sidoarjo 4 merasa terbantu sehubungan dengan di adakanya penambahan peralatan baru yang berupa <i>e-learnig</i> yang nantinya yang akan berbasis IT, jadi nanti segala media berbasis IT.</p>

NO	JUDUL/ PENELITI	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
			<p>4. Ancaman (<i>Treats</i>)</p> <p>a. Disharmonisasi hubungun antar guru karena tidak semua guru dilibatkan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di SMP Negeri 4 Sidoarjo.</p>
7.	<p>Pendidikan Inklusif Di Sekolah Dasar Kota Padang,</p> <p>Oleh Afrina Devi Marti, 2012.</p>	<p>Bagaimana penyelenggaraan sekolah inklusif di kota Padang</p>	<p>Berdasarkan hasil pembahasan yang di peroleh maka penulis menyimpulkan bahwasanya pelaksanaan pendidikan inklusif sudah bisa dikatakan dengan baik tetapi belum maksimal sepenuhnya. Dari segi dukungan administrasi sekolah dan kondisi di lingkungan sekitar sekolah dapat dilihat bahwa pendidikan inklusif sudah berjalan baik. Akan tetapi dari segi kompetensi guru dan dukungan masyarakat mengenai pendidikan inklusif belum berjalan maksimal.</p>
8.	<p>Proses Pembelajaran Dalam Setting Inklusif Di</p>	<p>Bagaimana proses pembelajaran secara inklusif, dengan rumusan masalah</p>	<p>Berdasarkan penjelasan mengenai pembelajaran dalam setting inklusif di SDN 18 Kota Luar kecamatan Pauh Padang</p>

NO	JUDUL/ PENELITI	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
	<p>Sekolah Dasar</p> <p>Oleh Rona Fitria, 2012</p>	<p>“Bagaimanakah proses pembelajaran di SD Negeri 18 Koto Luar Kecamatan Pauh Padang (Setting Inklusif)”. Sedangkan fokus penelitiannya adalah bagaimana proses pembelajaran dalam setting inklusif, kendala-kendala yang dihadapi serta usaha-usaha dari pihak sekolah dalam mengatasi kendala-kendala terkait dengan proses pembelajaran.</p>	<p>bahwa rancangan berbentuk RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan PPI (Program Pembelajaran Individual), metode yang digunakan dalam proses pembelajaran belum bervariasi, pengaturan tempat duduk telah bervariasi, media yang digunakan disesuaikan dengan materi pembelajaran, materi diambil dari buku paket dan guru pembimbing khusus melakukan penyederhanaan materi, sedangkan penilaian yang dilakukan guru hanya penilaian secara lisan saja. Guru tidak ada melakukan penilaian unjuk kerja, penilaian produk, dan penilaian portofolio. Kendala yang dihadapi antara lain banyaknya jumlah siswa didalam kelas serta ditambah dengan adanya siswa hiperaktif, <i>low vision</i> dan lamban belajar menyebabkan guru terkendala dalam mempergunakan metode pengajaran yang bervariasi. Selain itu kurangnya</p>

NO	JUDUL/ PENELITI	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
			pemahaman guru tentang bagaimana membelajarkan siswa berkebutuhan di dalam kelas serta kurangnya pengetahuan guru bagaimana melakukan penilaian portofolio
9.	Pelaksanaan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri 14 Pakan Sinayan Payakumbuh (Deskriptif Kualitatif) Oleh Winda Quida Sari, 2012	<p>(1) Bagaimana cara guru dalam mengidentifikasi anak yang akan di terima di sekolah SD Negeri 14 Pakan Sinayan Payakumbuh?</p> <p>(2) Kurikulum apa yang di gunakan di SDN 14 Pakan Sinayan Payakumbuh?</p> <p>(3) Bagaimana tanggung jawab dan peranan guru di SDN 14 Pakan Sinayan Payakumbuh?</p> <p>(4) Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di SDN 14 Pakan sinayan Payakumbuh?</p>	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat bahwa pelaksanaan inklusif di SD Negeri 14 Pakan Sinayan Payakumbuh tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam mengidentifikasi, asesmen, RPP, PPI, tanggung jawab dan peranan guru, sarana dan prasarana. Padahal hal itu tersebut penting dilakukan serta menjadi penentu keberhasilan program inklusif di SD Negeri 14 pakan Sinayan Payakumbuh. Program yang seharusnya disusun dan dilaksanakan oleh pihak yang terkait seperti identifikasi, asesmen, program layanan, RPP dan PPI tidak teraksana dengan baik, jika program yang diberikan tidak dilaksanakan maka laporan

NO	JUDUL/ PENELITI	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
			<p>tertulis pelaksanaan seluruh program juga tidak ada, sebaiknya para guru, GPK, kepala sekolah memang benar-benar melakukan tanggung jawabnya dan tahu tugasnya sebagai penyelenggara sekolah inklusif.</p> <p>Seharusnya berbagai kelalaian tersebut mendapat perhatian dan tindakan yang tegas dari pihak sekolah maupun otoritas pendidikan supaya program inklusif ini dapat ditegakkan dan berjalan seperti yang diharapkan. Namun, keputusan untuk menunjuk seorang guru yang dulunya mengajar bidang studi agama dan sudah pensiun untuk menjadi pengganti guru pembimbing khusus disebuah inklusif tampaknya harus ditindak lanjuti lagi, sebab akan timbul berbagai permasalahan yang akan merugikan banyak pihak, seperti yang telah terjadi di SD Negeri Pakan Sinayan Payakumbuh ini. Banyak</p>

NO	JUDUL/ PENELITI	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
			<p>program yang tidak dijalankan dengan maksimal serta bentuk kerja sama antara guru yang belum terjalin karena terkendala oleh ketidakpahaman dan kurangnya pengalaman guru itu sendiri.</p> <p>Terlihat sekali kurang efektifnya ketika GPK hanya mendampingi satu orang anak saja dari 30 orang ABK yang terdata di sekolah itu sementara kurangnya sarana dan prasarana disekolah tidak ditindak lanjuti dengan tegas oleh kepala sekolah, jika hal ini terus berlanjut tentu pelaksanaan inklusif tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.</p>
10.	Sikap Guru Terhadap Pendidikan Inklusif Ditinjau Dari Faktor Pembentuk Sikap	Bagaimana sikap guru terhadap pendidikan inklusif ditinjau dari faktor pembentukan sikap.	Sikap guru terhadap pendidikan inklusif yang muncul dalam penelitian ini berupa sikap positif yaitu sikap menerima terhadap pendidikan inklusif dan sikap negatif yaitu sikap menolak terhadap pendidikan inklusif. Faktor yang muncul dalam

NO	JUDUL/ PENELITI	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
	Oleh: Syafriada Elisa Aryani Tri Wrastari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, 2013		penelitian ini, yaitu pertama, faktor guru yang terdiri dari latar belakang guru, pandangan terhadap anak berkebutuhan khusus, tipe guru, tingkat kelas, keyakinan guru, pandangan sosial politik, empati guru, dan gender. Kedua, faktor pengalaman yang terdiri dari pengalaman mengajar anak berkebutuhan khusus dan pengalaman kontak dengan anak berkebutuhan khusus. Ketiga, faktor pengetahuan yang terdiri dari latar belakang pendidikan guru, pelatihan, pengetahuan, dan kebutuhan belajar guru. Keempat, faktor lingkungan pendidikan yang terdiri dari dukungan sumber daya, dukungan orang tua dan keluarga, dan sistem sekolah.
11.	Manajemen Sekolah Inklusif di SD Negeri Babatan V Surabaya	Bagaimana Manajemen Sekolah Inklusif di SDN Babatan V Surabaya	1. Dari pembinaan profesi GPK dapat dilihat perubahannya diantaranya pada pembuatan RPP, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi GPK terhadap

NO	JUDUL/ PENELITI	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
	<p>Oleh: Nur Mita Apriastuti 091714229</p> <p>Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, 2014</p>		<p>siswa berkebutuhan khusus</p> <p>a. Pembuatan RPP adalah salah satu tahap persiapan atau perencanaan sebelum guru memberikan pembelajaran di kelas dibuat untuk satu atau dua kali pertemuan dan GPK tidak membuat PPI untuk siswa berkebutuhan khusus, karena belum ada siswa berkebutuhan khusus yang diharuskan menggunakan PPI.</p> <p>b. Pelaksanaan pembelajaran adalah proses guru memberikan program pembelajaran atau penyampaian materi terhadap siswa berkebutuhan khusus di kelas konseling maupun di kelas reguler dengan menggunakan bantuan media yang</p>

NO	JUDUL/ PENELITI	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
			<p>bertujuan agar siswa mencapai kompetensi yang diharapkan.</p> <p>c. Evaluasi GPK terhadap siswa berkebutuhan khusus adalah pemberian nilai oleh GPK dengan bantuan guru kelas terhadap siswa berkebutuhan khusus yang lebih mengarah pada perkembangan perilaku, kedisiplinan dan partisipasi dalam kegiatan pembelajaran secara tertulis maupun melalui pengamatan dan pelaporan hasil evaluasi berupa pemberian rapor orange pada akhir semester.</p> <p>2. Peran Kepala sekolah dalam upaya peningkatan manajemen sekolah inklusif adalah kemampuan yang dimiliki kepala sekolah melalui peran-perannya diantaranya sebagai</p>

NO	JUDUL/ PENELITI	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
			<p>administrator dan supervisor untuk pencapaian tujuan sekolah inklusif yang diharapkan.</p> <p>a. Kepala sekolah sebagai administrator sekolah inklusif adalah penanggungjawab dalam program pelaksanaan atau administrasi sekolah inklusif, diantaranya: kegiatan mengatur: a) Kesiswaan, b) Kurikulum, c) Ketenagaaan, d) Sarana prasarana, e) Keuangan f) Hubungan dengan masyarakat, g) Kegiatan belajar mengajar.</p> <p>b. Kepala sekolah sebagai supervisor pembuatan administrasi guru adalah pengendali, pengawas, pembimbing terhadap guru</p>

NO	JUDUL/ PENELITI	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
			<p>setiap bulannya serta memfasilitasi guru untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan keterampilannya dalam melakukan proses pembelajaran.</p>
12.	<p>Manajemen Pendidikan Inklusif Di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh</p> <p>Ery Wati <i>Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2014</i></p>	<p>Bagaimana pelaksanaan penyelenggara sekolah inklusif dan menganalisa aspek penting terkait dengan pelaksanaan dan kendala pendidikan inklusif di Banda Aceh.</p>	<p>Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang dikemukakan di atas, selanjutnya peneliti akan menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program kepala sekolah dalam menyukseskan pendidikan inklusif di SD Negeri 32 kota Banda Aceh merupakan program yang sangat penting dan program tersebut didukung oleh semua staf di SD Negeri 32 kota Banda Aceh. Program pendidikan inklusif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar kepada anak berkebutuhan khusus dalam bidang pendidikan, jadi tidak ada lagi anak

NO	JUDUL/ PENELITI	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
			<p>berkebutuhan khusus yang tidak sekolah.</p> <p>2. Terkait dengan implementasi program pendidikan inklusif di SD Negeri 32 Kota Banda Aceh, kepala sekolah telah mengupayakan pelaksanaan program yang telah disusun. Hal ini dapat diketahui melalui kegiatan perencanaan pembuatan program, pelaksanaan program, serta pengawasan program yang dilakukan oleh kepala sekolah dan wakil dari Dinas PPO Kota Banda Aceh.</p> <p>Pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program pendidikan inklusif ini berjalan di dalam kelas (kurikulum, sarana dan prasarana pembelajaran dan guru pendamping khusus), dan juga untuk memberikan penilaian baik yang telah tercapai maupun yang belum tercapai.</p>

NO	JUDUL/ PENELITI	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
			Hambatan dalam melaksanakan pendidikan inklusif di SD Negeri 32 kota Banda Aceh meliputi: pembiayaan pendidikan, sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga guru pendamping khusus.
13.	<p>Problema Guru Pembimbing Khusus Dalam Penyelenggaraan Program Pembelajaran Individual Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di SDN 14 Koto Panjang (2017)</p> <p>Oleh : Miftahul Jannah, Damri, Ardisal</p>	Bagaimanakah problema guru pembimbing khusus dalam penyelenggaraan program pembelajaran individual bagi anak berkebutuhan khusus di SDN 14 Koto Panjang?	<p>1. Problema Guru Pembimbing Khusus dalam perencanaan pembelajaran individual. Guru belum menyusun program khusus untuk siswanya. Dan tidak menggunakan kurikulum khusus untuk siswa berkebutuhan khusus di kelas khususnya. Hanya saja guru selalu berinovasi untuk membuat rancangan media dan metode yang dibutuhkan siswa agar mudah memahami pembelajaran yang belum dikuasainya.</p> <p>2. Problema guru pembimbing khusus dalam pelaksanaan pembelajaran individual. Guru Pembimbing Khusus</p>

NO	JUDUL/ PENELITI	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
			<p>melaksanakan pembelajaran berdasarkan laporan dari guru kelas yang menyatakan bahwa setelah pemberian materi di kelas awalnya siswa mendapatkan nilai rendah. Dengan adanya hal tersebut terkadang guru belum memiliki persiapan yang matang untuk memberikan pembelajaran. Sehingga tuntutan dari guru kelas dapat diselesaikan.</p> <p>3. Problema guru pembimbing khusus dalam evaluasi pembelajaran individual. Dimana ketika pemberian evaluasi untuk siswa berkebutuhan khusus disamakan dengan siswa regular. Mengingat tidak adanya perbedaan antar siswa dalam pembelajaran. Dengan adanya hal tersebut, guru pembimbing khusus bekerja lebih agar siswanya dapat</p>

NO	JUDUL/ PENELITI	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
			memahami pembelajaran dengan mudah dan dapat menyelesaikan soal-soal saat evaluasi.
14.	<p>Tugas Pokok Guru Pembimbing Khusus (GPK) di SDN Surabaya (2018)</p> <p>Oleh: <i>Abdul Rajab,</i> <i>Budiyanto</i></p>	Bagaimana mendeskripsikan tugas pokok GPK di SDN Babatan V/460 Surabaya?	Berdasarkan hasil penelitian, dari sebelas tugas pokok GPK yang ada dalam buku pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif menunjukkan bahwa aspek membangun sistem koordinasi dan kolaborasi antar tenaga pendidikan dan kependidikan, aspek menyusun instrumen asesmen akademik dan non akademik, aspek menyusun program pembelajaran individual, aspek melaksanakan pendampingan dan/atau pembelajaran akademik, aspek melaksanakan pembelajaran khusus di ruang sumber, aspek membuat catatan khusus, telah dilaksanakan oleh GPK. Kemudian, aspek menyusun program layanan kompensatoris dan aspek memberikan pengayaan bagi peserta didik

NO	JUDUL/ PENELITI	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
			<p>berkebutuhan khusus belum dilakukan oleh GPK.</p> <p>Kesimpulan dari penelitian ini adalah 90% tugas pokok GPK berdasarkan Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tahun 2011 telah dilaksanakan oleh GPK di SDN Babatan V/460 Surabaya.</p>
15.	<p>Peranan Guru Pembimbing Khusus Lulusan Non-Pendidikan Luar Biasa (PLB) Terhadap Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusif Kabupaten Lumajang (2019)</p> <p><i>Erika Yunia Wardah</i></p>	<p>Bagaimana Peranan Guru Pembimbing Khusus Lulusan Non-Pendidikan Luar Biasa (PLB) Terhadap Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusif Kabupaten Lumajang?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam suatu lingkungan sekolah Inklusif Guru Pembimbing Khusus bukanlah lulusan Sarjana Pendidikan Luar Biasa, melainkan lulusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Matematika, Olahraga, Sains, PGSD. Mereka adalah guru kelas ataupun guru mata pelajaran yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk menjadi Guru Pembimbing Khusus di instansi tersebut. 2. Perencanaan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus masih belum berjalan dengan baik,

NO	JUDUL/ PENELITI	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
			<p>terutama dalam perencanaan program kekhususan bagi anak berkebutuhan khusus.</p> <p>3. Pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus tidak dapat berjalan dengan efektif dikarenakan minimnya pengetahuan guru pembimbing khusus non-PLB tentang anak berkebutuhan khusus.</p> <p>4. Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang telah mengupayakan pelatihan untuk guru pembimbing khusus non-PLB tentang program inklusif dan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus.</p>

Sumber : Data Peneliti 2019.

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian saat ini sejumlah 15, antara lain penelitian nomor 1 sampai 12 adalah penelitian yang menganalisis tentang penyelenggaraan sekolah inklusif dengan menekankan pada manajemen pelaksanaan penyelenggaraan sekolah inklusif. Pada penelitian-penelitian tersebut peneliti jadikan referensi untuk melihat gambaran secara umum bagaimana selama ini penyelenggaraan sekolah inklusif yang dilaksanakan di beberapa wilayah Indonesia.

Hasil penelitian terdahulu nomor 1 sampai 12, peneliti menemukan fakta bahwa manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia menemukan beberapa kendala diantaranya adalah

pemahaman pihak penyelenggara dan dukungan sumber daya anggaran terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif, terutama pada penyiapan sarana prasarana.

Penelitian terdahulu nomor 13 sampai nomor 15 yaitu, problema guru pembimbing khusus dalam penyelenggaraan program pembelajaran individual bagi anak berkebutuhan khusus di SDN 14 Koto Panjang (2017) Oleh: Miftahul Jannah, Damri, Ardisal. Tugas pokok Guru Pembimbing Khusus (GPK) di SDN Surabaya (2018) Oleh: Abdul Rajab, Budiyanto dan peranan Guru Pembimbing Khusus lulusan non-Pendidikan Luar Biasa (PLB) terhadap pelayanan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif Kabupaten Lumajang (2019), Oleh: Erika Yunia Wardah.

Pada penelitian nomor 13 sampai 15 di atas, peneliti mendapat referensi bahwa permasalahan penyelenggaraan pendidikan inklusif ditemukan juga permasalahan Guru Pembimbing Khusus yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dari ketiga penelitian tentang Guru Pembimbing Khusus tersebut, peneliti memulai membangun hipotetik penelitian. Pada penelitian terdahulu hanya menganalisis mengapa Guru Pembimbing Khusus memiliki permasalahan dalam melaksanakan tugasnya, tetapi di dalam penelitian saat ini, peneliti menganalisis implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif khususnya pada perekrutan Guru Pembimbing Khusus di Kota Surabaya, untuk menemukan akar permasalahannya, peneliti dapat memberikan solusi model penyelenggaraan pendidikan inklusif yang relevan khususnya perekrutan Guru Pembimbing Khusus untuk diterapkan di kota Surabaya.

2.2. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah salah-satu kajian dari Ilmu Administrasi Publik yang banyak dipelajari oleh ahli serta ilmuwan Administrasi Publik. Berikut beberapa pengertian dasar kebijakan publik yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Dye (1981:1): *“Public policy is whatever governments choose to do or not to do”*. Dye berpendapat sederhana bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara Anderson dalam *Public Policy-Making* (1975:3) mengutarakan lebih spesifik bahwa: *“Public policies are those policies developed by government bodies and official”*.

Berhubungan dengan konteks pencapaian tujuan suatu bangsa dan pemecahan masalah publik, Anderson dalam Tachjan (2006:19) menerangkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai

maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Seiring dengan pendapat tersebut Nugroho (2003:52) menjelaskan bahwa kebijakan publik berdasarkan usaha-usaha pencapaian tujuan nasional suatu bangsa dapat dipahami sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional dan keterukurannya dapat disederhanakan dengan mengetahui sejauhmana kemajuan pencapaian cita-cita telah ditempuh.

Setiap kebijakan publik mempunyai tujuan-tujuan baik yang berorientasi pencapaian tujuan maupun pemecahan masalah ataupun kombinasi dari keduanya. Secara padat Tachjan (2006:31) menjelaskan tentang tujuan kebijakan publik bahwa tujuan kebijakan publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan *public goods* (barang publik) maupun *public service* (jasa publik). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik.

Berdasarkan teori yang dikemukakan Bromley dalam Tachjan (2006:17), kebijakan publik memiliki tiga tingkatan yang berbeda berdasarkan hierarki kebijakan, yaitu: *policy level*, *organizational level*, *operational level*.

Dalam suatu negara demokratis *policy level* diperankan oleh lembaga yudikatif dan legislatif, sedang *organizational level* diperankan oleh lembaga eksekutif. Selanjutnya *operational level* dilaksanakan oleh satuan pelaksana seperti kedinasan, kelembagaan atau kementerian. Pada masing-masing level, kebijakan publik diwujudkan dalam bentuk *institutional arrangement* atau peraturan perundangan yang disesuaikan dengan tingkat hierarkinya. Sementara *pattern interaction* adalah pola interaksi antara pelaksana kebijakan paling bawah (*street level bureaucrat*) dengan kelompok sasaran (*target group*) kebijakan yang menunjukkan pola pelaksanaan kebijakan yang menentukan dampak (*outcome*) dari kebijakan tersebut. Hasil suatu kebijakan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan akan ditinjau kembali (*asesmen*) untuk menjadi umpan balik (*feedback*) bagi semua level kebijakan yang diharapkan terjadi sebuah perbaikan atau peningkatan kebijakan.

Adapun proses kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan. Efektivitas suatu kebijakan publik ditentukan oleh proses kebijakan yang melibatkan tahapan-tahapan dan variabel-variabel. Jones (1984:27-28) mengemukakan sebelas aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam kaitannya dengan proses kebijakan yaitu: "*perception/definition, aggregation,*

organization, representation, agenda setting, formulation, legitimation, budgeting, implementation, evaluation and adjustment/termination”.

Tachjan (2006:19) menyimpulkan bahwa pada garis besarnya siklus kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan;
- b. Implementasi kebijakan serta;
- c. Pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan.

Sementara menurut Maarse (1987), Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh isi dari kebijakan yang harus dilaksanakan dimana isi yang tidak jelas dan samar akan membingungkan para pelaksana di lapangan sehingga interpretasinya akan berbeda. Kemudian ditentukan pula oleh tingkat informasi dari aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan sehingga pelaksana dapat bekerja optimal. Lalu ditentukan juga oleh banyaknya dukungan yang harus dimiliki agar kebijakan dapat dilaksanakan dan pembagian dari potensi-potensi yang ada seperti diferensiasi wewenang dalam struktur organisasi.

Jadi efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi serta evaluasi. Ketiga aktivitas pokok proses kebijakan tersebut mempunyai hubungan kausalitas serta berpola siklikal atau bersiklus secara terus menerus sampai suatu masalah publik atau tujuan tertentu tercapai.

2.3. Teori Implementasi Kebijakan

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan, dalam pengertian yang luas, dipandang sebagai suatu tindakan dari proses kebijakan segera setelah undang-undang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah, individu secara pribadi atau kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan. Tindakan-tindakan yang dilakukan itu harus mampu mengaitkan antara tujuan

yang dirumuskan dan realisasi atau hasil yang akan dan atau telah dilakukan, agar ada sinkronisasi.

Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2006:65) bahwa Implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Grindle (1980:6) menghubungkan antara tujuan kebijakan terhadap realisasi dengan hasil kegiatan pemerintah, dengan menyatakan bahwa: *In general, the task of implementation is to establish a link that allows the goals of public policies to be realized as outcomes of governmental activity. It involves, therefore, the creation of a “policy delivery system”, in which specific means are designed and pursued in the expectation of arriving at particular ends.* Tindakan-tindakan yang cermat tersebut dalam suatu organisasi dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan atau otoritas sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku, menggunakan sarana dan prasarana, serta dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan. Dalam kaitan makna implementasi tersebut, Lester dan Stewart (2000, 104-105) mengemukakan bahwa: Implementasi bermakna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan adalah melaksanakan undang-undang dalam bentuk program kerja yang lebih operasional oleh aktor/implementor dalam organisasi yang terorganisir dengan baik, dilakukan dengan prosedur dan teknik kerja yang jelas, serta dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan kebijakan. Memang kenyataan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang kompleks, karena dalam pelaksanaannya merupakan satu sistem yang tidak lepas dari sub-sub sistem yang ada (input-proses-output) sampai dengan *outcome* atau dampak yang ditimbulkan.

Dampak yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan merupakan sasaran utama, oleh karena itu konsensus atau kesepakatan-kesepakatan para pejabat bawahan (*implementor*) sangat berperan serta dalam hal ini. Disamping itu konsensus tersebut menunjukkan bahwa motivasi dan tanggungjawab

implementor dalam membangun organisasi sebagai wadah menjalankan amanah mensejahterakan masyarakat semakin terwujud.

Gross dan Berstein (dalam Winarno, 2007:153) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi konsensus dalam rangka pencapaian tujuan, yaitu: Pertama, peran serta dapat menimbulkan semangat staf yang tinggi dan semangat staf yang tinggi diperlukan bagi implementasi yang berhasil; kedua, peran serta menimbulkan komitmen yang besar dan tingkat komitmen yang tinggi diperlukan untuk mempengaruhi perubahan; ketiga, peran serta menimbulkan kejelasan yang lebih besar tentang suatu pembaharuan dan kejelasan diperlukan untuk implementasi; dan keempat, peran serta memudahkan implementasi yang berhasil; para pejabat bawahan akan cenderung menentang suatu pembaharuan, jika prakarsa atas pelaksanaan kebijakan semata-mata berasal dari pejabat yang menjadi atasan mereka.

Dalam pandangan lain, bahwa implementasi kebijakan mutlak terdiri dari 3 (tiga) unsur utama yang saling berkaitan satu sama lain sebagai suatu sistem. Menurut Abdullah (1988: 11) dan Smith (1987: 261), ketiga unsur utama tersebut meliputi: (a) unsur pelaksana (*implementor*); (b) adanya program yang akan dilaksanakan; (c) target *groups*". Pada tingkat pemerintahan, pihak yang terutama berkewajiban melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokrasi (Sharkansky, 1975: Ripley & Grace A. Franklin, 1986). Selanjutnya Smith dalam Quade (1975:261) menyebutnya dengan istilah "*implementing organization*", maknanya adalah birokrasi pemerintah bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan publik.

Birokrasi pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan yang dalam posisinya secara hirarkial adalah para pejabat dalam struktur organisasi mempunyai kekuasaan personal. Kekuasaan personal dalam pandangan Winarno (2007:159) dapat diukur dari: Pertama, pejabat melakukan rekrutmen dan seleksi, penugasan dan korelasi, kenaikan pangkat, dan akhirnya pemecatan. Kedua, pejabat dapat melakukan kontrol anggaran belanja pada unit-unit yang ada, memiliki kewenangan untuk menanggapi pencapaian kebijakan yang memuaskan atau tidak memuaskan, dan mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku bawahan. Bentuk yang dipertanggung jawabkan pemerintah dalam implementasi kebijakan adalah program-program yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya melalui keputusan-keputusan kebijakan publik. Dalam kaitan itu Tachjan (2008: 31) menyatakan bahwa: "pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program". Hal yang sama juga dikemukakan oleh Grindle (1980:

6) bahwa: *“Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect”*. Berbagai program yang bersifat operasional tersebut harus dipahami oleh implementor/pelaksana program mengenai aspek isinya, tujuan/sasaran dari program tersebut, pengalokasian anggaran dan ketepatan peruntukannya, metode dan prosedur kerja secara tepat, serta kejelasan standar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

Pada prinsipnya terdapat dua pemilahan jenis teknik atau model implementasi kebijakan. Pemilahan pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola "dari atas ke bawah" (*top-bottomer*) versus dari "bawah ke atas" (*bottomtopper*), dan pemilahan implementasi yang berpola paksa (*command-and-control* dan mekanisme pasar (*economic incentive*)).

Secara matematis model ini dapat disebut sebagai "Zero-Minus Model", dimana yang ada hanya nilai "nol" dan "minus" saja. Secara matematis model ini disebut sebagai "Zero-Plus Model", dimana yang ada hanya nilai "nol" dan plus". Karena itu, secara lengkap model di atas disebut sebagai *Zero Plus-Minus Model* "*top-down*" mulanya berupa pola yang dikerjakan oleh pemerintah, dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. Sebaliknya, "*bottom* bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat. Di antara kedua kutub ini ada interaksi pelaksanaan antara pemerintah dengan masyarakat.

Label MH, MS, HG, GR terletak di kuadran "puncak ke bawah" sedangkan Label RE terletak di kuadran "bawah ke puncak". Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar-organisasi;
2. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor;
3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan
4. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementor.

Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik dengan berbagai pertimbangan bahwa pada observasi awal, peneliti menduga (hipotetk) bahwa regulasi tentang penyelenggaraan sekolah inklusif dalam

regulasinya sudah ideal, dugaan peneliti bahwa ada implementasi yang tidak ideal, adapun pertimbangan menggunakan model teori implementasi kebijakan publik, peneliti mempelajari beberapa model diantaranya seperti yang ada pada matrik di bawah ini:

Tabel. 2.2. Matrik Model Teori Implementasi

ADAM SMITH (1973)	VAN MATTER/ VAN HORN (1975)	GEORGE EDWARD III (1980)	GRINDLE (1980)	MASMANIAN SABATIER (1983)
<p>Kebijakan yg ideal : Pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya.</p>	<p>Standar dan sasaran kebijakan/ ukuran dan tujuan kebijakan</p>	<p>Komunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transmisi • Kejelasan • Konsistensi 	<p>Isi Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepentingan yang berpengaruh • Tipe manfaat (cenderung kepada target kebijakan untuk masyarakat • Derajat perubahan yang diinginkan • Letak pengambilan keputusan • Pelaksana program • Sumber daya yang digunakan 	<p>Karakteristik masalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kesulitan teknis masalah • Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran • Prosentase kelompok sasaran dari total populasi
<p>Target group : Bagian dari <i>Policy stakeholder</i> yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena</p>	<p>Sumber daya</p>	<p>Sumber daya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Staf/tenaga pelaksana • Informasi • Wewenang • Fasilitas fisik 	<p>Lingkungan Implementasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yg terlibat • Karakteristik lembaga dan rezim yg berkuasa 	<p>Karakteristik kebijakan/UU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kejelasan isi kebijakan • Seberapa jauh kebijakan memiliki teoritis • Besarnya alokasi

ADAM SMITH (1973)	VAN MATTER/ VAN HORN (1975)	GEORGE EDWARD III (1980)	GRINDLE (1980)	MASMANIAN SABATIER (1983)
kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan maka diharapkan dapat menyesuaikan pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan			<ul style="list-style-type: none"> • tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran 	<p>sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antara institusi pelaksana. • Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana • Tingkat komitmen aparat. • Seberapa luas akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
Implementasi organisasi yaitu badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan	Karakteristik organisasi pelaksana	Disposisi <ul style="list-style-type: none"> • Sikap • Komitmen 		Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi sosial ekonomi masyarakat tingkat kemajuan ekonomi • Dukungan Publik terhadap sebuah kebijakan

ADAM SMITH (1973)	VAN MATTER/ VAN HORN (1975)	GEORGE EDWARD III (1980)	GRINDLE (1980)	MASMANIAN SABATIER (1983)
				<ul style="list-style-type: none"> • Sikap dari kelompok pemilih • Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.
Faktor lingkungan yaitu unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya sosial ekonomi dan politik.	Sikap para pelaksana	Struk Birokrasi <ul style="list-style-type: none"> • SOP • Fragmentasi 		
	Komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan			
	Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.			

Sumber: Pengolahan Data Peneliti, 2020

Peneliti memutuskan menggunakan teori implementasi George Edward III dengan mempelajari penelitian-penelitian terdahulu terkait implementasi kebijakan publik, materi kuliah teori implementasi kebijakan publik dan kesesuaian dengan materi penelitian yang dilaksanakan.

2.4. Teori Implementasi Kebijakan George Edward III.

Berikutnya untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun pada penelitian ini penulis untuk memecahkan permasalahan pendidikan inklusif, penulis menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III. Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

1. Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
2. Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureucratic structure* (Edward, 1980).

2.4.1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Edward, 1980). Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar

informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

2.4.2 Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward (1980) mengemukakan bahwa: bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan:

1. Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2. Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4. Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

2.4.3 Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam masa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

2.4.4 Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan

menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Model implementasi kebijakan ini, mengedepankan bentuk hubungan antara kebijakan dengan pelaksanaan (*performance*). Model ini tidak hanya mengkhuskan hubungan antara variabel bebas dan Variabel tergantung, tetapi juga hubungan antar variabel bebas itu sendiri. Keberhasilan atau kegagalan Implementasi Kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: Komunikasi, sumber daya, disposisi atau perilaku birokrasi dan Struktur Birokrasi. Keempat faktor tersebut secara simultan bekerja dan berinteraksi satu sama lain agar membantu proses implementasi atau sebaliknya menghambat proses implementasi. keempat faktor tersebut saling mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung keefektifan implementasi kebijakan.

2.5. Pendidikan Inklusif

2.5.1 Kebijakan Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif di Indonesia memiliki landasan yang sangat kuat karena didasarkan pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dalam penjelasan Pasal 15 ditegaskan bahwa “pendidikan khusus bagi peserta didik yang mengalami hambatan belajar karena kelainan fisik, mental, intelektual, emosi dan sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, dapat diselenggarakan secara inklusif dan/atau berupa satuan pendidikan khusus”.

Disamping itu kebijakan inklusif juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 70 tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa.

Pendidikan inklusif juga didukung oleh kesepakatan internasional, Pendidikan Untuk semua (PUS) yang terkenal dengan *Education for All* (EFA), berdasarkan Pernyataan Salamanca, pada Kongres Internasional di kota Salamanca, Spanyol pada tahun 1994, yang antara lain menetapkan bahwa semua anak sebaiknya belajar bersama tanpa diskriminasi, yang didasarkan kepada kebutuhan siswa, dan anak berkebutuhan khusus diberi layanan khusus di sekolah reguler.

Pendidikan inklusif kalau dikaitkan dengan kebijakan publik, tertuang pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Pasal 2 disebutkan bahwa tujuan

pendidikan inklusif: (a) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; (b) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

Kebijakan administratif misalnya tentang peraturan-peraturan penerimaan siswa baru, bantuan biaya pendidikan, sarana prasarana, tenaga kependidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang bersifat substantif misalnya sistem evaluasi, kebijakan kenaikan kelas, dan proses belajar mengajar. Proses Belajar Mengajar sebaiknya dikembalikan pada esensi pendidikan, yaitu bahwa mendidik adalah menemukan potensi paling esensi dari masing-masing siswa untuk ditumbuh kembangkan oleh guru sebagai seorang fasilitator yang mengantarkannya dengan penuh kasih sayang. Bila hal ini dilakukan berarti kita telah mengupayakan untuk mengembalikan budaya masyarakat yang sangat peduli terhadap pendidikan, yang dewasa ini sangat dirasakan sudah mulai memudar, dan kurang peduli karena ada pandangan dikotomis bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, dan partisipasi senantiasa dikaitkan dengan dukungan uang. Pendidikan inklusif tidak akan dapat berhasil tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat, anak berkebutuhan khusus akan mau bersekolah di sekolah inklusif hanya apabila didukung oleh orang tua dan masyarakat. *Stakeholders* dapat mendukung sekolah dengan dukungan berupa sarana, prasarana, alat bantu belajar, biaya, dukungan teknis, dan penyediaan lapangan kerja bagi lulusan yang memenuhi syarat.

Setidaknya, apabila merujuk pada beberapa dokumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Konvensi Hak Anak (1989), Deklarasi Dunia Tentang Pendidikan Untuk Semua (1990), Peraturan Standar tentang Persamaan Hak Bagi Difabel (1993), dalam beberapa substansinya mempunyai pointer-pointer yang relevan dengan semangat pendidikan inklusif sebagai sebuah penyelenggaraan pendidikan yang mengakomodasi keberbedaan, keunikan serta keberagaman masing-masing peserta didik. Terlebih apabila mengacu pada pernyataan salamanca (1994) yang secara lebih mengerucut memberikan *guideline* yang jelas mengenai penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dalam setting inklusif.

2.5.2 Konsep Pendidikan Inklusif

Konsep pendidikan inklusif muncul dimaksudkan untuk memberi solusi, adanya perlakuan diskriminatif dalam layanan pendidikan terutama bagi anak-anak penyandang cacat atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif memiliki prinsip dasar bahwa selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka.

Secara konseptual pendidikan inklusif merupakan sistem layanan Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang mempersyaratkan agar semua ABK dilayani di sekolah umum terdekat bersama teman seusianya. Dalam pendidikan inklusif penempatan ABK *tingkat ringan, sedang dan berat* secara penuh di kelas reguler.

Konsep pendidikan inklusif memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial yang ada di sekolah (David Smith, 2006). Inklusif dapat dikaitkan dengan persamaan, keadilan, dan hak individual dalam pembagian sumber-sumber seperti politik, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Menurut Reid, masing-masing dari aspek-aspek tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan satu sama lain (Gavin Reid, 2005).

Inklusif penyediaan layanan pendidikan dan (pendidikan lain-program khusus) bagi ABK pada waktu yang sama dengan anak normal (Sunardi, 1995). Ideologi pendidikan inklusif secara internasional dalam Konferensi Dunia tahun 1994 oleh UNESCO di Salamanca Spanyol dinyatakan dalam komitmen "Pendidikan Untuk Semua". Komitmen ini menegaskan pentingnya memberikan pendidikan bagi anak, remaja, dan orang dewasa yang memerlukan pendidikan di dalam sistem pendidikan reguler, menyetujui kerangka aksi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (Mohamad Sugiarmun dan MIF Baihaqi: Editor, 2009).

Pendidikan inklusif juga menciptakan suasana sekolah yang menghargai multicultural (Smith, 1998). Dalam hal ini prinsip pendidikan inklusif memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengembangkan potensinya melalui layanan pendidikan yang tepat. Tinjauan tersebut mengungkap beberapa bukti sikap positif implementasi pendidikan inklusif yang oleh Norwich pendekatan 'zero reject' terhadap penyediaan pendidikan khusus. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam layanan inklusif tentang sikap dan perspektif para guru yang terlibat dalam pembuatan penyediaan pendidikan inklusif bagi ABK.

Telaah konseptual tersebut di atas memberikan gambaran bahwa: pertama, pendidikan inklusif sebagai pendidikan yang memberikan kesempatan yang adil kepada semua siswa untuk bisa mengakses pendidikan tanpa membedakan gender, etnik, status sosial dan kebutuhan khusus (kemampuan) pada semua level/jenjang pendidikan. Kedua, dalam sekolah inklusif menerapkan model multiinput artinya tidak mengenal penolakan murid. Kondisi ini tentu berbeda dengan sistem seleksi siswa baru dalam persekolahan yang saat ini masih cenderung menggunakan seleksi peringkat nilai hasil kelulusan. Ketiga, program kurikulum dalam pendidikan inklusif berbasis kepada anak.

Dalam hal ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan anak, sehingga kurikulum akademik dapat dipilah menjadi: (a) ABK dengan kemampuan akademik rata-rata dan di atas tinggi disiapkan kurikulum *duplikasi* atau kurikulum untuk ABK disamakan dengan kurikulum umum; (b) ABK dengan kemampuan akademik ringan disiapkan kurikulum *modifikasi* atau kurikulum umum dirubah untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa ABK; (c) ABK dengan kemampuan akademik sedang disiapkan kurikulum *substitusi* atau beberapa bagian dari kurikulum umum ditiadakan tetapi diganti dengan sesuatu yang kurang lebih sama; (d) ABK dengan kemampuan akademik rendah disiapkan kurikulum *omisi* atau beberapa bagian dari kurikulum umum ditiadakan sama sekali karena tidak memungkinkan bagi ABK. Juga perlu disiapkan kurikulum kompensatoris (aspek kekhususan), yaitu kurikulum khusus untuk meminimalisasai *barier* pada setiap ABK sebelum belajar aspek akademik. Keempat, sistem evaluasi bersifat adil disesuaikan dengan kemampuan siswa. Bagi siswa yang mampu mengikuti evaluasi reguler dievaluasi sesuai sistem evaluasi reguler, dengan memodifikasi instrumen jika diperlukan. Namun bagi siswa dengan program pendidikan individual (PPI) maka evaluasi dalam bentuk narasi yang disesuaikan dengan PPI-nya. Hasil evaluasi selain dikonfersi dalam bentuk kuantitatif dan berbentuk deskriptif, yang menggambarkan pencapaian kinerja. Khusus untuk ABK dengan kategori sedang dan berat hasil evaluasi bukan sebagai indikator kenaikan jenjang pendidikan lanjut, tetapi sebagai tolok ukur peningkatan potensi kemandirian untuk kehidupan di lingkungannya.

Adapun pengembangan bahan ajar perlu memperhatikan pengembangan aspek akademik, berorientasi pada kebutuhan pasca sekolah, berorientasi pada kebutuhan anak untuk pengembangan keterampilan fungsional/vokasional, dan pengembangan kemampuan perilaku adaptif. Pendidikan inklusif menunjukkan tidak hanya sekedar bermain-main dengan sebuah sistem pendidikan tetapi

memperlihatkan beberapa penyesuaian terhadap sistem pendidikan. Melainkan fokusnya adalah pada "perubahan sistem pendidikan dan di sekolah" dengan demikian mereka dapat melayani kebutuhan pembelajaran siswa yang beragam karena latar belakang sosial dan budaya serta karakteristik individu dalam hal motivasi, kemampuan, gaya dan irama dalam belajar. Menurut perspektif ini, bukan para siswa di sekolah yang harus menyesuaikan pendidikan yang ada tersedia saat ini, melainkan sekolah yang harus menyesuaikan pada kebutuhan setiap siswa, karena semua siswa beragam.

Pendidikan inklusif digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program sekolah. Dalam ranah pendidikan, istilah inklusif dikaitkan dengan model pendidikan yang tidak membedakan individu berdasarkan kemampuan dan atau kelainan yang dimiliki individu.

Untuk mencapai potensi tersebut, sistem pendidikan harus dirancang dengan memperhitungkan perbedaan-perbedaan yang ada pada diri siswa. Bagi mereka yang memiliki ketidakmampuan khusus dan/atau memiliki kebutuhan belajar yang luar biasa harus mempunyai akses terhadap pendidikan yang bermutu tinggi dan tepat. Baihaqi dan Sugiarmun (1996) menekankan bahwa siswa memiliki hak yang sama tanpa dibedakan berdasarkan perkembangan individu, sosial, dan intelektual. Perbedaan yang terdapat dalam diri individu harus disikapi dunia pendidikan dengan mempersiapkan model pendidikan yang disesuaikan dengan perbedaan-perbedaan individu tersebut. Perbedaan bukan lantas melahirkan diskriminasi dalam pendidikan, namun pendidikan harus tanggap dalam menghadapi perbedaan.

Daniel P. Hallahan (1999) mengemukakan pengertian pendidikan inklusif sebagai pendidikan yang menempatkan semua peserta didik berkebutuhan khusus dalam sekolah reguler sepanjang hari. Dalam pendidikan seperti ini, guru memiliki tanggung jawab penuh terhadap peserta didik berkebutuhan khusus tersebut (Baihaqi dan M. Sugiarmun, 2006). Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa pendidikan inklusif menyamakan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya. Untuk itulah, guru memiliki tanggung jawab penuh terhadap proses pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dengan demikian guru harus memiliki kemampuan dalam menghadapi banyaknya perbedaan peserta didik.

Senada dengan pengertian yang disampaikan Daniel P. Hallahan, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua

peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009).

Pengertian pendidikan dalam Permendiknas di atas memberikan penjelasan secara lebih rinci mengenai siapa saja yang dapat dimasukkan dalam pendidikan inklusif. Perincian yang diberikan pemerintah ini dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan yang sudah disesuaikan dengan kondisi Indonesia, sehingga pemerintah memandang perlu memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik dari yang normal, memiliki kelainan, dan memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan. Dengan demikian pemerintah mulai mengubah model pendidikan yang selama ini memisah-misahkan peserta didik normal ke dalam sekolah reguler, peserta didik dengan kecerdasan luar biasa dan bakat istimewa ke dalam sekolah (baca: kelas) akselerasi, dan peserta didik dengan kelainan ke dalam Sekolah Luar Biasa (SLB).

Rumusan mengenai pendidikan inklusif yang disusun oleh Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa (PSLB) Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mengenai pendidikan inklusif menyebutkan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama-sama teman seusianya. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di sekolah yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak dan menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil (Pedoman Umum Pendidikan Inklusif Mandikdasmen).

Selanjutnya, Staub dan Peck (1995) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan, apapun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya. Sementara itu, Sapon-Shevin (O'Neil, 1995) menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai system layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Oleh karena itu, ditekankan adanya restrukturisasi sekolah, sehingga menjadi

komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, artinya kaya dalam sumber belajar dan mendapat dukungan dari semua pihak, yaitu para siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitarnya.

Melalui pendidikan inklusif, anak berkelainan dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya (Freiberg, 1995). Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak normal dan anak berkelainan yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas.

Pendidikan inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana-prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya. Keuntungan dari pendidikan inklusif adalah bahwa anak berkebutuhan khusus maupun anak biasa dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai dengan potensinya masing-masing.

Pendidikan inklusif mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem persekolahan. Pandangan mengenai pendidikan yang harus menyesuaikan dengan kondisi peserta didik ini sangat terkait dengan adanya perbedaan yang terdapat dalam diri peserta didik. Pandangan lama yang menyatakan bahwa peserta didiklah yang harus menyesuaikan dengan pendidikan dan proses pembelajaran di kelas lambat laun harus berubah (Henry Clay Lindgren, 1987).

Pendidikan inklusif merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meninggalkan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Hambatan yang ada bisa terkait dengan masalah etnik, gender, status sosial, kemiskinan. Salah satu kelompok yang paling tereksklusi dalam memperoleh pendidikan adalah siswa penyandang cacat. Sekolah dan layanan pendidikan lainnya harus fleksibel dalam memenuhi keberagaman kebutuhan siswa untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Pendidikan inklusif ini memegang tugas dan tanggung jawab yang penting, karena pada dasarnya pendidikan untuk semua kalangan tanpa membedakan apapun merupakan kebutuhan dasar untuk menjamin keberlangsungan hidup agar lebih bermartabat. Karena itu negara memiliki

kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk mereka yang memiliki perbedaan.

Pendidikan inklusif adalah merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Hambatan yang ada bisa terkait dengan masalah etnik, gender, status sosial, kemiskinan dan lain-lain. Dengan kata lain pendidikan inklusif adalah pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Pendidikan inklusif diselenggarakan dengan tujuan:

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya.
2. Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar
3. Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggalkan kelas dan putus sekolah.
4. Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran.
5. Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Ps. 32 ayat 1 yang berbunyi 'setiap warga negara berhak mendapat pendidikan', dan ayat 2 yang berbunyi 'setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya'. UU no. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Ps. 5 ayat 1 yang berbunyi 'setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu'. UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Ps. 51 yang berbunyi 'anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif berarti pendidikan yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan semua peserta didik, baik peserta didik yang normal maupun peserta didik berkebutuhan khusus. Masing-masing dari mereka memperoleh layanan pendidikan yang sama tanpa dibeda-bedakan satu sama lain. Dengan demikian, pendidikan inklusif, sesuai dengan beberapa pengertian di atas, selain menampung anak-anak yang memiliki kelainan juga menampung anak-anak

yang memiliki bakat dan/atau kecerdasan luar biasa agar dapat belajar bersama-sama dalam satu kelas.

2.6. Konsep Penelitian

Berikut adalah proses yang dapat ditunjukkan oleh peneliti dalam membangun konsep penelitian yang akan dilaksanakan:

1. Berangkat dari latar belakang permasalahan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang selama ini ada, peneliti mengungkapkan indikator-indikator permasalahan yang selanjutnya dirumuskan dalam satu rumusan permasalahan penelitian di Kota Surabaya.
2. Peneliti akan fokus menganalisa bagaimana implementasi perekrutan Guru Pembimbing Khusus pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III.
3. Setelah melaksanakan penelitian untuk menganalisa implementasi perekrutan Guru Pembimbing Khusus pada penyelenggaraan pendidikan inklusif yang berada di Kota Surabaya dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III. Didapatkan temuan-temuan penelitian mengenai implementasi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
4. Dari temuan penelitian beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, peneliti merumuskan model penyelenggaraan pendidikan inklusif yang relevan untuk perekrutan guru pembimbing khusus.
5. Dari rangkaian penelitian tersebut peneliti akan membuat kesimpulan dan rekomendasi serta proposisi mengenai implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya khususnya pada perekrutan guru pembimbing khusus.